BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penyajian hasil penelitian dan pembahas tentang Neralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pilkada DI Kabupaten Sijunjung Tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyebab ketidaknetralan ASN dalam Pilkada di Kabupaten Sijunjung 2020 penyebabnya adanya hubungan kekeluargaan, ambisi karir jabatan, rendahnya pengetahuan terhadap peraturan, lemahnya penegakan hukum, dan Faktor Loyalitas ASN :
 - a) Penyebab yang Pertama seorang ASN Terlibat dan memihak dalam Pilkada 2020 adalah Hubungan Kekeluargaan jabatan karna Calon yang di dukung biasanya terafiliasi dengan pimpinan Daerah yang juga sebagai pimpinan partai politik bahkan juga Kepala Daerah merupakan kerabat dari calon tertentu.
 - b) Penyebab yang ke dua adalah faktor Ambisi Karir Jabatan yang Kandidat yang didukung menang dalam pemilihan, maka biasanya ASN yang sebelumnya berjasa mendukung, kemudian mendapatkan promosi jabatan sebagai imbalanya.
 - c) Penyebabnya yang keempat adalah Rendahnya Pengetahuan Terhadap Peraturan bahwa banyak Kurangnya pengetahuan ASN terhadap aturan UUD No 5 PP 53 disiplin pegawai PP 42 kode etik

- d) Penyebabnya yang ke tiga adalah Lemahnya Pengegakan Hukum untuk di tegakan dan berdampak tidak timbul efek jera bagi ASN bahkan memandang remeh dampak hukum yang di timbulkan ketika ASN tersebut tidak Netral.
2. Upaya untuk mewujudkan Netralitas ASN dalam Pilkada di Kabupaten Sijunjung 2020 dengan melibatkan peranan institusi yang terkait yaitu: Badan Pengawasan Pemilu (BAWASLU) dan Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam):
 - a) Upaya Bawaslu Kabupaten Sijunjung dalam mewujudkan netralitas ASN di Pilkada Kabupaten Sijunjung tahun 2020:
 - 1) Bawaslu Kabupaten Sijunjung Telah himbauan berupa memasang dan membuat 61 spanduk yang di pasang dan di sebarkan di seluruh nagari/desa di Kabupaten Sijunjung
 - 2) Meningkatkan pemahaman pegawai terhadap ASN netralitas ASN melalui Brousur yang di abgikan kepada pegawai ASN ke kantor-kantor pemerintahan, rumah ibadah, sekolah sera sarana kesehatan yang dipergunakan oleh masyarakat
 - 3) Memberikan advokasi melalui media baik cetak elektronik maupun online mengenai Netralitas ASN
 - 4) Meningkatkan pengawasan pada saat kampanye. Jajaran pengawas pemilu di Kabupaten Sijunjung melakukan pengawasan melekat disetiap kegiatan kampanye, dimana

ketika menemukan ada ASN yang ikut dalam kampanye tersebut segera memberikan edukasi dan penyampaian larangan agar tidak ikut secara aktif dalam kegiatan tersebut

- 5) Bawaslu juga melakukan sosialisasi dengan mengundang pegawai-pegawai, camat, walinagari dan perangkat lainnya untuk pengetahuan tentang Netralitas ASN
 - 6) Menghimbau ASN untuk menerapkan prinsip netralitas ASN untuk menjaga dan menegakkan prinsip netralitas ASN menghindari konflik kepentingan
 - 7) Menghimbau ASN untuk tidak melakukan praktik intimidasi dan ancaman kepada pegawai ASN dan masyarakat tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.
 - 8) Menghimbau ASN untuk menggunakan media sosial secara bijak, tidak untuk mendukung pasangan calon tidak untuk ujaran kebencian dan berita bohong. Dan Menghimbau ASN untuk menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.
- b) Upaya Panwascam dalam mewujudkan netralitas ASN di Pilkada Kabupaten Sijunjung tahun 2020:
- 1) Ketua Panwascam dan anggota Panwascam melakukan pertemuan di kantor camat dengan mengundang ASN

setiap kantor dikecamatan tersebut baik sekolah maupun rumah sakit

- 2) Pawascam juga melakukan pencegahan semacam surat edaran yang di berikan kepada walinagari, pemerintahan setiap Nagari, Kantor Camat, Polsek dan Koramil termasuk dinas pendidikan
- 3) Ketua panwascam sudah melakukan sosialisasi ke berbagai nagari sebelum melakukan pemilihan bahkan sebelum melakukan kampanye
- 4) Panwascam aktif melakukan sosialisasi mengenai netralitas ASN hal ini dilakukan karena salah satu hasil temuan kajian ini adalah kurang pengetahuan dan pemahaman pegawai ASN terhadap peraturan berkaitan Netralitas Pegawai ASN

4.2 Saran

1. Untuk mengurangi atau meminimalisir keterlibatan ASN perlu adanya konsolidasi(perbuatan untuk memperteguh atau memperkuat hubungan dan persatuan) dari semua pihak termasuk masyarakat untuk mewujudkan pemilu yang adil, jujur dan bersih. Kerjasama semua pihak, Badan/Lembaga Pemerintah, stekholder dan semua elemen pemerintah lainnya sangat penting termasuk kerjasama dengan masyarakat karena tanpa kerjasama dan relasi baik satu sama lain semua tidak akan bisa berjalan dengan baik dan tercapai.
2. Perlunya Komisi Aparatur Sipil Negara segera menindak tegas dan secara cepat ditindak lanjuti laporan dari hasil pemeriksaan Bawaslu terkait oknum ASN pemerintah Kabupaten Sijunjung yang diduga tidak netral dan agar memberikan sanksi yang sesuai bagi ASN agar ada efek jera bagi mereka selalu birokrat pemerintahan di Kabupaten Sijunjung dan yang lain tidak ikut lagi terjun dalam dunia politik walaupun ingin terjun tinggalkan terlebih dahulu jabatan mereka sebagai ASN.
3. Masyarakat Harus di dorong untuk dapat melakukan pengawasan Partisipatif agar kedepan masyarakat juga dapat mencegah dengan melaporkan hal-hal yang merupakan pelanggaran Netralitas yang dilakukan oleh Oknum-oknum ASN.